D I N A M I K A

Lembaga Informasi Perburuhan Sedane
Jl. Dewi Sartika 52F Bogor 16121
Telp.:0251-344473, lips@indo.net.id

AKATIGA
Jl. Cilamaya 7 Bandung 40115
Tlp.:022-4235526, akatiga@indosat.net.id

DINAMIKA adalah analisis triwulan kondisi perburuhan di Indonesia yang didasarkan pada kliping koran dan majalah (*Kompas*, *Bisnis Indonesia*, *Media Indonesia*, *Suara Pembaruan*, *Republika*, *Pikiran Rakyat*, *Jawa Pos*, *Bernas*, *Tempo*, *Gatra*). Analisis ini terutama menyoroti dua aspek dalam isu perburuhan, yaitu resistensi buruh dan peluang pembangunan gerakan buruh dalam upaya memahami kondisi perburuhan untuk penguatan gerakan buruh.

SITUASI EKONOMI-POLITIK INDONESIA TAHUN 2003

Di setiap penghujung tahun pemerintah selalu melaporkan kinerjanya. Disebutkan bahwa selama tahun 2003 mereka telah berhasil memperbaiki kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi makro sepanjang tahun itu dinyatakan relatif stabil dengan indikasi stabilnya nilai tukar rupiah pada kisaran Rp 8.500 per dolar AS; realisasi yang sedikit lebih kuat dibanding dengan target pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2003 sebesar Rp 9.000 per dolar AS. Indikator makro lainnya yang berhasil ditingkatkan pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4 persen, sesuai patokan APBN. Selain itu, inflasi pun ditekan pada kisaran 5,06, terendah dalam empat tahun terakhir.

Namun apalah artinya stabilitas ekonomi makro jika tidak sejalan dengan membaiknya kondisi di sektor riil. Sektor riil Indonesia cenderung memburuk dan makin terbengkalai saja, seakan luput dari perhatian pemerintah. Ditambah lagi dengan terjadinya berbagai peristiwa yang menyisakan kecemasan dan teror. Teror bom selain telah menyumbat jalannya roda perekonomian, juga telah menyumbangkan bertambahnya angka pengangguran. Peristiwa bom Bali tahun 2002 lalu kini tercatat telah menambah angka ribuan orang kehilangan pekerjaan. Peristiwa lain yang cukup mengenaskan adalah terbakarnya pasar tekstil Tanah Abang, Jakarta, dan penggusuran rumah-rumah penduduk di beberapa kawasan di Jakarta oleh pemerintah DKI. Sementara itu, kehidupan politik Indonesia masih terus dicorengi berita kebocoran dana dan korupsi di beberapa bank besar, seperti BNI dan BRI. Akal-akalan ala pejabat Bank ini tentu ikut memperparah sumbatan jalannya perekonomian sektor riil.

Berita tentang stabilitas ekonomi makro pun seakan menutupi kenyataan gagalnya pemerintah dalam memperbaiki sektor riil dan menanggulangi tingkat pengangguran yang meninggi. Total nilai ekspor (Januari-November 2003) anjlok sekitar 1,57 persen dibanding tahun lalu. Ada beberapa sektor industri yang ekspornya cenderung terus menurun dari tahun ke tahun. Penurunan yang paling mencolok adalah sektor tekstil. Berdasarkan data Bank Indonesia (September 2003), ekspor tekstil yang pada Januari mencapai 262 juta dolar AS, per Agustus anjlok menjadi hanya 10,1 juta dolar AS. Dapat dipastikan bahwa ekspor sektor andalan utama nonmigas ini akan kian terpuruk menjelang penghapusan rejim kuota MFA (*Multi Fibre Agreement*) per 1 Januari 2005. Selama ini ekspor tekstil Indonesia lebih banyak mengandalkan kuota daripada meningkatkan daya saing.

Daya saing yang rendah di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) mengakibatkan banyak perusahaan tekstil gulung tikar. Asosiasi Pertekstilan Indonesian (API) menyatakan bahwa sekitar separo dari 2.760 perusahaan pertekstilan akan bangkrut menjelang dan pascapenghapusan kuota awal 2005. Pada tahun 2002 lalu PHK di sektor ini mencapai 19 ribu buruh dan tahun 2004 dipastikan jumlahnya akan jauh lebih besar. Ekspor TPT Indonesia ke negara kuota pada 2002 mencapai 47 persen dan diperkirakan hilangnya jatah kuota per satu persen akan mengakibatkan PHK sebanyak 10 ribu buruh.

Selain TPT, sektor perhutanan dan perkayuan juga menghadapi gejolak dan ancaman kebangkrutan. Setidaknya 196 ribu buruh industri yang terkonsentrasi di Kalimantan itu mengalami ancaman PHK menyusul kebijakan pemerintah yang mengetatkan tata cara pembayaran provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) yang diwajibkan bagi perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada pemerintah.

Pemerintah sebenarnya telah mencanangkan tahun 2003 sebagai tahun investasi. Namun realisasi investasi asing hampir dikatakan tidak ada, kecuali investasi portofolio (lewat bursa). Investasi yang terpantau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hanyalah persetujuan penanaman modal asing. Itu pun dari sisi jumlah proyek yang memperoleh persetujuan BKPM terhitung menurun jika dibandingkan tahun lalu. Tercatat, jumlah proyek yang memperoleh persetujuan selama Januari-Oktober 2003 hanya 726 proyek senilai 4,6 miliar dolar AS. Padahal, periode yang sama tahun sebelumnya berjumlah 898 proyek senilai 4,1 miliar dolar AS. Di sini tampak gambaran semakin menurunnya perekonomian masyarakat di sekor riil.

Kondisi ini kemudian diperburuk oleh proses privatisasi yang terus dilancarkan pemerintah. Privatisasi dilakukan guna mencari dana segar untuk membayar utang dan sekaligus untuk menarik investasi asing. Namun pemerintah melakukannya secara tidak transparan. Privatisasi hanyalah titik awal dari proses pemusatan sumber daya ekonomi kepada investor kakap sekaligus memperlebar kesenjangan kelas sosial-ekonomi masyarakat. Privatisasi memusatkan kepemilikan sumber daya pada pemilik modal. Ini akan berdampak pada pelebaran jurang antara masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggi. Privatisasi selalu dikaitkan dengan upaya meningkatkan efesiensi usaha secara mikro dan penumpukan keuntungan terutama secara materi bagi pemegang saham (*shareholder*), padahal dampaknya semu: kepentingan sekelompok orang. Pemerintah juga

mengobral murah aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan berlindung di balik *letter of intent* IMF. Dana yang masuk ke kas negara dengan demikian berasal dari obral aset, bukan benar-benar investasi baru yang menciptakan lapangan kerja. Malah rasionalisasi buruh terus terjadi setelah aset-aset itu dilepas ke jaringan pemilik dana asing yang kebanyakan berbasis di Singapura.

Krisis dan beban kesulitan ekonomi tampaknya masih belum beranjak dari pundak bangsa Indonesia. Bank Dunia memperkirakan bahwa pada tahun 2002 lalu sebanyak 53 persen dari penduduk Indonesia (110 juta jiwa) hidup di bawah garis kemiskinan, yakni dengan tak lebih dari 2 dolar AS (Rp 17.000) per hari (berdasarkan standar internasional). Data statistik tahun 2002 juga memperlihatkan bahwa dari 100,8 juta angkatan kerja, 58 persen hanya berpendidikan SD ke bawah, 36,5 persen SMP/SMU, sisanya 5,5 persen lulusan diploma dan perguruan tinggi. UNDP mengeluarkan data HDI (*Human Development Index*-Indeks Pembangunanan Manusia) bagi Indonesia, yakni 0,682 pada 2003 yang turun dari 0,684 pada tahun 2002. Posisi Indonesia melorot dari 110 menjadi 112 dari 172 negara, nyaris sama kedudukannya dengan Kamboja, Laos dan Myanmar.

Profil Pertumbuhan dan Pengangguran

Periode	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tambahan Lapangan Kerja (juta)	Angkatan Kerja Baru (juta)	Pengangguran Terbuka	
				(juta)	%
1996	7,82	3,79	3,96	4,29	4,86
1999	0,79	1,14	2,11	6,03	6,26
2000	4,92	1,14	0,94	5,81	6,07
2001	3,44	0,97	3,16	8	8,10
2002	3,66	0,84	1,97	9,13	9,06
2003	3,99	1,10	2,10	10,13	9,85
2004	4,49	1,40	2,10	10,83	10,32
2005	5,03	1,75	2,07	11,19	10,45

Sumber: *Sarkenas BPS (1996-2002); Bappenas (2003-2005)* (Data dikutip dari *Bisnis Indonesia*, 30 September 2003)

PHK dan Pengangguran Semakin Memburuk

Berdasarkan pemberitaan beberapa media cetak, selama tahun 2003 tercatat tak kurang dari 40 ribu buruh telah mengalami PHK dan menyusul ancaman PHK terhadap sekitar 500 ribu buruh lainnya. Sementara itu mereka yang dirumahkan sedikitnya mencapai 15 ribu dan ribuan lainnya tidak menerima upah. Setiap hari, pemberitaan media dipenuhi dengan berbagai kasus PHK dan unjuk rasa buruh, terutama mereka yang bekerja di sektor tekstil dan garmen.

Seperti di tahun-tahun sebelumnya, perselisihan antara buruh dan pengusaha menghiasi pemberitaan media. Perselisihan yang paling menjadi perhatian utama publik adalah kasus di PT. Dirgantara Indonesia (DI). Kemelut yang terjadi sejak pertengahan Juli 2003 itu belum juga selesai hingga akhir tahun 2003. Perselisihan kemudian melibatkan aparat keamanan, tentara dan pemerintah. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. DI akhirnya gigih untuk tetap merasionalisasikan 6 ribu dari 12 ribu buruhnya. Mereka juga tetap berencana akan menjual saham perusahaan kepada pihak asing di Asia Tenggara. Sementara itu dana talangan sebesar 50 juta dolar AS (Rp 450 miliar) telah disiapkan pemerintah untuk pesangon yang dianggap buruh tidak mencukupi ketentuan. Persoalan pun makin runyam: PT. DI terancam tidak mampu memenuhi kontrak pembuatan komponen Airbus A-380 dari British Aerospace dan pembuatan pesawat CN-235 untuk Pakistan. Konon PT. DI akan kekurangan modal jika gaji buruh diambil dari dana internal.

Pada Oktober 2003, perusahaan besar Grup Texmaco juga terbelit utang dan kekurangan modal hingga melumpuhkan unit-unit usahanya. Gejolak dan keresahan buruh pun tak terelakkan, terjadi di seluruh perusahaan Texmaco yang tersebar di beberapa wilayah. Perusahaan-perusahaan besar seperti Texmaco dan PT. DI yang mengalami krisis keuangan memilih untuk memutuskan hubungan kerja dengan buruh mereka. Pengangguran pun kian bertambah. PT. DI ikut meningkatkan tingginya angka pengangguran hingga tak kurang dari enam ribu angkatan kerja, sedangkan Texmaco menyumbangkan enampuluh ribu. Sementara itu PT. Kiani Kertas ikut menyumbangkan pengangguran dengan mem-PHK empat ribu buruh, dan pabrik pengolahan kayu PT. Kayumanis tiga ribu buruh.

Tingginya angka pengangguran dibarengi dengan PHK massal yang terjadi sepanjang tahun 2003 cukup meresahkan. Keadaan ini diperparah dengan makin bertambahnya calon-calon tenaga kerja yang tak dapat diserap lapangan kerja. Angka pengangguran terbuka (tidak bekerja sama sekali) saat ini berjumlah 10,13 juta orang, sementara pengangguran tertutup (setengah bekerja) mencapai 35 juta. Sementara itu, angkatan kerja terus bertambah sekitar 2,10 juta setiap tahunnya.

Pinjaman Utang, Hibah dari ADB, dan Kebijakan Penanganan Masalah Pengangguran

Pemerintah sebetulnya mendapatkan bantuan dari Asian Development Bank (ADB) untuk menanggulangi masalah pengangguran ini. ADB telah menyetujui pinjaman senilai 85 juta dolar AS untuk mendanai proyek perluasan lapangan kerja melalui peningkatan kemampuan UKM berorientasi ekspor, melalui Bank Ekspor Indonesia dan bank umum lokal lainnya. Proyek yang berlangsung hingga akhir 2007 itu menelan dana 113 juta dolar AS. Dana sebesar itu tentu masuk dalam daftar utang negara. Namun, ADB juga memberi hibah (bantuan cuma-cuma) sebesar 500.000 dolar AS untuk dukungan asistensi teknis bagi bank, UKM eksportir yang mendapatkan pinjaman, serta untuk studi dampak peristiwa bom Bali bagi UKM di Bali dan sekitarnya. Hibah juga datang dari JICA (Japan Internatonal Cooperation Agency) sebesar 5 juta dolar AS.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan bahwa untuk mengurangi pengangguran terbuka, langkah utama yang ditempuh pada 2004 adalah menempatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Belum selesai permasalahan kurangnya perlindungan kerja para TKI di luar negeri, tampaknya pemerintah malah menargetkan 750.000 orang untuk diberangkatkan ke luar negeri. Lalu apakah tidak lanjut pemerintah mengelola pinjaman dana dari ADB yang tak sedikit itu?

Seperti diberitakan di beberapa harian, pemerintah juga akan melakukan proyek padat karya untuk petani

yang terkena dampak kekeringan di 11 kabupaten di Jawa Tengah. Proyek padat karya yang akan menggarap berbagai proyek irigasi seperti rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi irigasi desa, dan pembuatan embung itu diperkirakan akan menelan biaya Rp 1,3 Milyar. Sedangkan program padat karya nonpetani sebesar Rp 6 miliar dilaksanakan pemerintah pada September 2003 di 40 lokasi di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Tentu ini merupakan program 'hiburan' karena merupakan jaring pengaman (*safety net*) sementara yang tak mengentaskan masalah pengangguran. Selain itu, ADB juga mensyaratkan bantuannya hanya untuk UKM berorientasi ekspor, padahal pengangguran terjadi di berbagai sektor. Kebijakan ini tentu hanya akan melanggengkan pola ekstraksi atas Indonesia selama ini. Apa yang dilakukan ADB bukanlah mendorong Usaha Kecil agar mandiri, akan tetapi mendukung ketergantungan Indonesia terhadap modal asing.

KEBIJAKAN PERBURUHAN YANG MASIH MERUGIKAN BURUH

Kebijakan Upah Minimum

Di beberapa wilayah, pada tahun 2004 upah nominal buruh akan mengalami kenaikan hingga 8,5 persen. Di Jakarta, upah minimum akan menjadi Rp 671.550 per bulan, naik 6,3 persen dibanding 2003 lalu. Di Jawa Timur UMK per bulan direncanakan sebesar Rp 550.700 untuk Surabaya, Rp 550.500 untuk Gresik dan Rp 550.500 untuk Sidoarjo. Di Batam, meski terus diprotes pengusaha, Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Riau juga akhirnya menetapkan UMK Batam menjadi Rp 602.175,- naik sekitar 8,5 persen dari upah yang berlaku sebelumnya. Di Bandung, diiringi protes besar para buruh, UMK 2004 ditetapkan Rp 588.407.

Bagi sebagian besar buruh dan serikat buruh, upah minimum yang baru masih sangat rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak. Dalam hitungan yang wajar, seorang buruh memerlukan Rp 1.300.000,- per bulan untuk menyewa kamar, membeli 20 kg beras, 4 kg daging, 4 kg telur, 2 pasang pakaian dan kebutuhan lain. Kenaikan upah di Batam juga dikeluhkan buruh karena masih lebih rendah dari Jakarta, padahal biaya hidup di pulau itu jauh lebih tinggi dibanding di ibu kota. Seperti biasa, kenaikan upah setiap tahun tidak begitu ditunggu oleh buruh karena mereka dapat memastikan kenaikan upah selalu akan diiringi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan sehari-hari.

Jaminan Sosial

Selain masalah upah, perlindungan sosial juga masih sangat lemah. Banyak perusahaan belum mendaftarkan buruhnya menjadi peserta jamsostek. Hingga Desember 2003 masih ada 19 ribu perusahaan yang belum mengikutsertakan sembilan juta buruh, atau 29 persen

dari angkatan kerja Indonesia. Minimnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja juga masih menjadi masalah yang terus dihadapi buruh.

Berdasarkan penilaian Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organisation*--ILO) dalam hal kecelakaan kerja, Indonesia menduduki peringkat kedua terburuk di dunia. Pemerintah pun pernah mengatakan bahwa saat ini kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian mencapai 40 orang per 100 ribu buruh. Harus diakui bahwa kesadaran para buruh Indonesia mengenai kesehatan dan keselamatan kerja ini tergolong masih sangat rendah. Keadaan ini juga terus dimanfaatkan baik oleh pemerintah maupun pengusaha: pemerintah terus berupaya menggalang dana dari saku para buruh lewat lembaga Jamsostek, namun layanan lembaga ini kerapkali dikeluhkan para buruh; sementara itu cukup banyak pengusaha tidak menyetorkan dana jaminan sosial yang telah dikeluarkan buruh. Sumber masalah selalu datang dari pemerintah dan pengusaha.

Paket UU Perburuhan

Pada tanggal 25 Februari 2003 DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang Undang Ketenagakerjaan yang sempat tertunda beberapa lama. Meski telah mengalami berbagai perbaikan, bahkan dilakukan bersama-sama (beberapa wakil) serikat buruh, namun substansi UU tidak pernah berubah; UU Ketenagakerjaan menegaskan sikap pemerintah yang tidak lagi berkewajiban untuk memberikan perlindungan pada kaum buruh. UU ini telah melegalkan praktik 'pemanfaatan' sumber dari luar (*outsourcing*) yang lebih murah dan melenturkan sistem ketenagakerjaan (*labour flexiblity*). Hak dasar buruh lain yang dicabut dengan diberlakukannya undang-undang ini adalah hak mogok sebagai hak kolektif buruh dengan memperumit prosedur pemogokan.

Rancangan Undang Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (RUU PPHI)) akhirnya disahkan juga pada 16 Desember 2003. Dalam UU PPHI yang akan berlaku mulai satu tahun mendatang. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) akan digantikan dengan Pengadilan Hubungan Industrial di tiap provinsi. Pengadilan Hubungan Industrial terdiri dari 2 hakim *ad hoc* masing-masing dari pengusaha dan serikat buruh, serta seorang hakim karier. Bila selama ini penyelesaian perselisihan perburuhan bisa memakan waktu 5-10 tahun, penyelesaian perselisihan hubungan industrial kali ini tidak boleh melebihi 120 hari.

Penolakan keras atas lahirnya UU PPHI datang dari berbagai elemen, bahkan sejak kebijakan tersebut masih dalam tahap penggodokan. Namun pemerintah tetap saja menggolkan aturan hukum yang merugikan buruh itu. Dengan disahkannya UU PPHI ini, perselisihan perburuhan telah dianggap semata-mata sebagai kasus pidana antara buruh dan majikan (secara individual), tanpa melibatkan serikat sebagai entitas kolektif buruh. Dapat dipastikan, dalam setiap kasus buruh akan selalu kalah, bahkan sebelum persidangan dibuka. Dalam aturan UU ini pelemahan terhadap serikat kembali terjadi. Kecenderungan di atas memang terjadi di mana-mana. Salah satu penyebabnya ialah bahwa modal dapat berputar dan berpindah secepat hentakan tuts komputer. Fleksibilitas (kelenturan) tenaga kerja pun menjadi model ketenagakerjaan dewasa ini.

RESISTENSI BURUH

Kebijakan-kebijakan perburuhan yang memojokkan posisi buruh memang tidak lahir tanpa tentangan. Berbagai elemen organisasi buruh muncul dan mencoba memprotes lahirnya undang-undang perburuhan yang baru. Selain itu, seperti halnya di tahun-tahun sebelumnya, buruh juga menentang keras rendahnya kenaikan upah.

Berbagai survei mengenai kebutuhan hidup minimum pun dilakukan oleh banyak serikat. Di Jawa Timur, Dewan Buruh propinsi itu melakukan survei harga kebutuhan hidup pada September-Oktober 2003 di lebih 20 pasar dekat wilayah pemukiman buruh di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Tuban, Mojokerto, Jombang, Kediri dan Tulungagung. Survei yang dilakukan, di samping mengacu pada Kepmenaker No. 81/M/BW/1995, juga mengacu pada kebutuhan hidup minimum (KHM) yang ditetapkan Biro Pusat Statistik tahun 1995 dan pembelanjaan nyata buruh setiap bulan.

Hasil survei tersebut membuktikan total biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sederhana seorang buruh lajang di Jawa Timur per bulan berkisar antara Rp 954.940,- hingga Rp 1.266.135. Survei tersebut juga menyatakan bahwa upah buruh rata-rata hanya sebesar 5,3 persen dari total biaya produksi, namun 'biaya siluman' yang harus dikeluarkan pengusaha mencapai lebih 30 persen. Untuk membandingkan, mereka menyebutkan bahwa di Thailand upah buruh mencapai 13 persen dan di Malaysia mencapai 23 persen dari total biaya produksi.

Selain soal kebijakan dan upah, maraknya kasus pengrumahan dan PHK akhir-akhir ini juga direspon keras oleh para buruh. Puluhan ribu buruh melakukan protes terhadap perusahaan-perusahaan mereka yang sewenang-wenang mem-PHK, merumahkan, dan menutup pabriknya tanpa memberi pesangon. Resistensi terkuat yang pernah dilakukan buruh sepanjang tahun 2003 adalah dari para buruh PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

Buruh salah satu perusahaan BUMN itu menggugat keputusan perusahaan yang telah merumahkan tak kurang dari enam ribu buruh. Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan (SPFKK) PT. DI terus melakukan protes baik melalui aksi massa maupun jalur hukum. Mereka menggugat Direktur Utama secara pidana dan perdata lewat proses Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Sidang pertama digelar pada 31 Juli 2003, dan kembali digelar pada 4 Agustus, 11 September, 6 November dan 9 Desember 2003. Sidang yang selalu dihadiri oleh ribuan buruh telah

Basis Aksi dan Keterlibatan Buruh sepanjang tahun 2003

Sektor	Jumlah Aksi	Buruh Terlibat
Manufaktur	47	52.895
Transportasi dan Komunikasi	31	11.590
Perdagangan Umum dan Jasa	14	1.885
Kimia, Energi & Pertambangan	4	3.079
Pertanian dan Perkebunan	1	150
Aliansi Serikat Buruh	16	12.05
Jumlah	**113**	**81.649**

Sumber: *LIPS - AKATIGA Quarterly Labour Update. Diolah dari kliping berita perburuhan*

memenangkan gugatan buruh, dan Direksi PT. DI akhirnya mencabut SK dirumahkannya ribuan buruh tersebut. Namun kemudian pihak Direksi PT. DI mengajukan surat ke Depnakertrans meminta izin melakukan PHK bagi 3.900 buruhnya. Pesangon yang disiapkan BUMN itu pun tak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pada Oktober 2003 sempat terjadi unjuk rasa bersama antara ribuan buruh PT DI dan Texmaco di depan kantor BPPN untuk mempertanyakan nasib mereka. Ribuan buruh dua perusahaan besar ini berkali-kali menggelar aksi, mendatangi banyak tempat dari gedung pengadilan, kantor BPPN, gedung DPR pusat dan daerah, kantor PBB, hingga istana presiden.

Selama tahun 2003, basis perlawanan buruh terbesar masih terjadi di sektor tekstil, sandang dan kulit (manufaktur). Meskipun demikian, bersamaan dengan munculnya berbagai isu dan persoalan di berbagai sektor, perlawanan mulai meluas ke sektor-sektor lain: transportasi dan komunikasi; perdagangan umum dan jasa; serta kimia, energi dan pertambangan. Unjuk rasa para buruh dari seluruh sektor mencapai 113 kali dengan melibatkan sebanyak 81.649 buruh. Aksi aliansi antarserikat terjadi 16 kali dengan melibatkan 12.050 buruh.

Meski demikian, secara umum resistensi buruh masih sangat lemah. Aksi yang melibatkan aliansi antarserikat sebagian besar terjadi secara kebetulan. Kebanyakan dari mereka sibuk masing-masing dengan kepentingannya. Buruh tekstil dan garmen di masing-masing pabrik masih sibuk sendirian dengan isu-isu upah, PHK, pesangon dan kebebasan berserikat. Spontanitas perlawanan buruh BCA menolak privatisasi, hanya dilakukan buruh bank bersangkutan. Aksi buruh semen ketika memprotes kebijakan menteri BUMN dalam menjual perusahaan semen ke pihak swasta juga tidak melibatkan buruh lain. Begitu juga buruh Telkom dan Indosat melawan privatisasi tanpa dukungan buruh lain. Aksi bersama yang terjadi hanya dilakukan spontan dan terkesan secara kebetulan.

Serikat-serikat buruh, terutama di tingkat nasional, mencoba merespon masalah-masalah ekonomi-politik makro. Hanya saja seruan mereka untuk aksi nasional belum berhasil mendapatkan dukungan mayoritas buruh. Seperti seruan mogok aliansi serikat buruh BUMN dan KSPI menentang kebijakan *release and discharge*, privatisasi, kenaikan harga BBM, listrik dan telepon, disambut dingin sebagian besar buruh seperti nampak di kawasan industri Jawa Barat. Karena itu perlawanan mereka terkesan hanya slogan.

Tidak solid dan kurang terorganisasinya aksi buruh selama ini disebabkan semakin besarnya tekanan persoalan internal serikat seperti jumlah anggota yang terus menurun akibat banyak buruh di-PHK, iuran anggota yang sangat minim tidak cukup untuk menjalankan organisasi, rendahnya kesadaran buruh untuk apa berserikat hingga membuat mereka bersikap apatis terhadap serikat, kesenjangan antara aktivis dan buruh anggotanya, tingginya potensi konflik antarpengurus serikat maupun antaraktivis serikat dan LSM terutama berkaitan soal keuangan dan sebagainya. Semua persoalan, eksternal dan internal menumpuk dalam waktu yang bersamaan.

Pada tingkat nasional, isu-isu seperti penolakan RUU Ketenagakerjaan, anti-globalisasi, anti-liberalisasi, anti-WTO, anti-IMF, anti-privatisasi, tuntutan penghapusan utang luar dan dalam negeri, anti-relokasi pabrik, penurunan harga BBM, bahkan sampai isu penggulingan Megawati juga sudah menjadi bagian dari masalah serikat buruh. Kebijakan ekonomi makro yang tidak berpihak pada kaum buruh ini memang semakin memperburuk kondisi buruh di tingkat pabrik hingga mau tidak mau mereka harus ikut melawan kebijakan yang tidak populer tersebut.

Namun, peran yang dimainkan serikat buruh, sekali lagi, belum optimal dan belum secara sungguh-sungguh memperjuangkan kesejahteraan anggotanya. Malah ada segelintir pengurus serikat yang 'berjuang' membela pengusaha untuk menekan buruh, tentu dengan imbalan yang mereka terima. Ada pula yang berunding dengan pengusaha untuk menjamin tak ada mogok dan unjuk rasa. Padahal, keberadaan lembaga tripartit yang menjadi satu-satunya saluran politik formal untuk menentukan upah belum berfungsi dengan baik. Selain struktur keanggotaan yang belum mencerminkan keterwakilan yang proporsional dan demokratis, wakil-wakil buruh belum berjuang secara optimal. Tidak heran jika banyak keputusan upah yang tidak menguntungkan buruh. Di Bogor, Kelompok Buruh Bogor (KBB) serentak menekan Bupati untuk segera mencabut keputusan penentuan upah yang merugikan buruh. Aksi serupa yang melibatkan perlawanan aliansi serikat juga muncul di Semarang dan Surabaya. Mesti terkadang kerap menjadi bumerang, aksi protes tetap menjadi pamungkas buruh.

ORGANISASI BURUH YANG TERPECAH-PECAH

Protes keras para buruh dan aktivis perburuhan terhadap produk kebijakan pemerintah tampaknya tidak membuat pemerintah bergeming, lalu mengikuti tuntutan dan kehendak buruh. Protes keras yang terjadi memang tidak diorganisasi secara efektif, pun tak banyak melibatkan buruh. Aliansi yang dilakukan para aktivis perburuhan tak cukup berarti dalam mempengaruhi proses legislasi kebijakan perburuhan. Tak terkecuali mengenai upah, protes-protes kerapkali tak mendatangkan perbaikan bagi buruh.

Persoalan rendahnya upah minimum memang merupakan dampak yang paling jelas dari buruknya situasi ekonomi. Pemerintah selalu menetapkan upah minimum yang sangat minim. Kenyataan ini pun menjadi alasan utama banyak perusahaan yang tidak memberikan upah yang layak, dan parahnya, alasan ini justru diperkuat oleh beberapa serikat buruh dimana mereka ikut meyakinkan anggota untuk memaklumi keberatan pengusaha dan menerima kenyataan upah mereka tidak naik. Hal yang penting buat mereka saat ini adalah bekerja, tidak peduli bahwa upah yang mereka terima jauh dari mencukupi kebutuhan hidup layak.

Pilihan-pilihan yang dihadapi para buruh dewasa ini memang amat dilematis. Pilihan kebanyakan para buruh untuk tak hirau dengan upah rendah dan yang terpenting dapat bekerja tentu merupakan pilihan yang realistis. Namun keadaan ini tidak lantas membenarkan ulah pengusaha untuk seenaknya mengeksploitasi buruh. Di sini pemerintah dituntut untuk berperan aktif: melindungi buruh dan memastikan tidak ada eksploitasi pengusaha atas buruh. Tetapi hingga saat ini pemerintah hampir tak mampu melakukan perlindungan terhadap buruh. Upaya-upaya advokasi yang dilakukan serikat pun tak banyak membuahkan hasil berarti. Kebanyakan buruh akhirnya memilih tak mau ambil pusing dengan urusan serikat. Kurangnya partisipasi anggota tentu menjadi kendala klasik serikat buruh hingga saat ini.

Harus diakui, resistensi yang dilakukan serikat buruh selama ini masih kurang menunjukkan hasil, dalam arti belum mendorong peningkatan kondisi buruh. Reformasi membuka beberapa kesempatan, seperti kebebasan berserikat, namun belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Setelah ada kebebasan berorganisasi, masih belum juga muncul organisasi buruh yang benar-benar efektif dalam memperjuangkan kepentingan buruh. Kebijakan dilegalkannya pembentukan serikat dengan batasan minimal 10 orang dapat berorganisasi malah mendorong terjadinya keterpecah-pecahan dalam tubuh serikat. Peluang membangun organisasi buruh yang kuat kembali buyar.

Kebebasan berorganisasi memang tidak mesti selalu menghasilkan gerakan buruh yang efektif. Sejarah disorganisasi selama tigapuluh tahun, tingkat pengangguran yang tinggi, persaingan antaraktifis buruh, daya tawar modal yang begitu kuat terhadap buruh karena mobilitasnya secara global, semuanya masih menghambat munculnya gerakan buruh yang signifikan, yang tidak hanya bersifat sporadis dan sementara. Memang sangat sulit mengharapkan gerakan buruh yang

kuat jika organisasi buruhnya terpecah-pecah. Organisasi buruh selama ini lebih banyak berpikir tentang bagaimana meluaskan anggotanya masing-masing, tetapi kurang memikirkan jalan bagaimana mengkonsolidasikan mereka. Kebanyakan serikat tidak memiliki strategi untuk membantu anggotanya yang di-PHK, dan karenanya kehilangan kader-kader yang sudah dibina. Akibatnya kader datang dan pergi, dan pendidikan selalu harus dimulai lagi awal.

Sejak bermunculannya serikat buruh di awal-awal era reformasi tahun 1998, sebetulnya mulai ada upaya untuk mempersatukan mereka kembali dalam satu wadah konfederasi. Dorongan ini muncul dari ICFTU Apro yang menginginkan ada satu serikat buruh di Indonesia yang berafiliasi pada salah satu konfederasi buruh internasional ini. Kebutuhan ini terutama untuk menggantikan FSPSI (sekarang KSPSI) yang dinilai tidak reformis dan serikat yang dicap sebagai kepanjangan tangan pemerintah, terutama di jaman Orde Baru.

Tahun 1999 muncul Sekretariat Bersama, sebagai upaya paling awal untuk membentuk konfederasi. Upaya ini gagal, tetapi kemudian berbagai forum muncul, seperti Forum Solidaritas Union (FSU) pada tahun 2000 yang difasilitasi oleh ACILS. Hanya saja usia FSU tidak lama. Forum yang dibentuk pertama-tama untuk merespon lahirnya UU serikat buruh ini juga kemudian mandeg (stagnan). Baru pada tahun 2001, mulai dirintis pembentukan komite yang langsung difasilitasi oleh ICFTU Apro.

Tahun 2002 lalu, komite yang bersifat masih longgar ini, membentuk kepengurusan dan menetapkan 12 serikat (federasi) sebagai anggota, mulai menggunakan nama KSPI. Pada 30-31 Januari 2003 lalu, KSPI melakukan kongres pertamanya di Sukabumi. Kongres ini menandakan tahap baru perkembangan serikat buruh Indonesia, dan sekaligus merupakan puncak dari upaya pengarusutamaan (*mainstreaming*) gerakan buruh.

Selain telah terbentuk konfederasi KSPI, FSPSI (status quo) juga sudah mendeklarasikan diri menjadi konfederasi dan namanya kini sudah berubah menjadi KSPSI. Selain kedua konfederasi ini, pada tingkat nasional masih ada SBSI yang tidak dilibatkan karena dianggap sudah berafiliasi pada WCL. Ada juga serikat yang tidak bergabung dengan ketiga konfederasi tersebut seperti FNPBI, SOPAN, SPK, SARBUMUSI, dan lain-lain. Serikat buruh yang disebut belakangan ini memiliki kedekatan dengan partai-partai politik. FNPBI dengan PRD, SOPAN dengan PAN, SPK dengan Partai Keadilan, dan Sarbumusi dengan PKB.

Pada sisi lain, upaya pengembangan gerakan buruh yang berbasis regional atau lokal masih terus berjalan. Sebagian besar serikat ini tidak dibentuk menurut basis sektoral, melainkan lintas sektor melalui pendekatan wilayah. Mereka mengorganisasi buruh dari sektor manapun dalam satu serikat. Pola pembentukan serikat seperti ini sebetulnya tidak diakomodasi oleh UU 21/2000 tentang serikat buruh. Hingga pada tahun-tahun pertama reformasi, mereka mengalami kesulitan dalam hal pendaftaran yang berdampak pada tertutupnya akses politik di lembaga tripartit, tidak berhak melakukan perundingan dengan pengusaha dan terbatasnya ruang gerak di tingkat perusahaan. Posisi mereka sangat marjinal, dan semakin marjinal dengan dideklarasikannya beberapa konfederasi yang mendapat berbagai akses dan ruang politik baik di tingkat perusahaan, lokal ataupun nasional.

Kebijakan otonomi daerah sebetulnya bisa menjadi peluang bagi mereka untuk menjadi serikat yang kuat di tingkat lokal pada masa yang akan datang. Ketika kebijakan negara tentang berbagai persoalan perburuhan dilimpahkan ke tingkat daerah, keberadaan serikat buruh di tingkat nasional menjadi kurang berarti. Buruh di tingkat lokal lah yang lebih dekat dengan persoalan buruh dan yang paling efektif untuk merespon persoalan basis. Otonomi daerah juga memaksa serikat buruh nasional untuk melakukan 'desentralisasi' kepemimpinan ke tingkat lokal. Kedekatan kepentingan praktis sehari-hari telah membuat mereka membangun jaringan lokal dengan serikat wilayah. Berbagai forum atau aliansi telah terbentuk.

Di Medan ada Komite Aksi Buruh Medan, Lampung muncul aliansi buruh Lampung, di Jakarta ada Komite Anti Penindasan Buruh, di Tangerang muncul forum Cisadane, di Bogor ada Kelompok Buruh Bogor, di Bandung ada Komite Aksi Buruh Bandung, Jawa Tengah ada Fokus, di Jawa Timur ada Forum Buruh Jawa-Timur. Aliansi-aliansi yang terdiri dari beberapa serikat buruh dan atau LSM Perburuhan di suatu daerah, awalnya merupakan respon pada kebutuhan pada aksi bersama atas persoalan-persoalan di tingkat lokal seperti persoalan upah, kriminalisasi buruh, aksi Satu Mei (*May Day*) dan sebagainya, setelah pengalaman bekerja bersama beberapa tahun terakhir ini, mulai terbangun ikatan yang relatif lebih kuat dari aliansi ini.

Saat ini aliansi-aliansi tersebut masih bersifat longgar dan taktis. Kerjasama yang ada antar mereka baru sebatas merespon persoalan-persoalan jangka pendek dan spontan ketimbang kerjasama yang bersifat jangka panjang dan strategis. Namun melihat sudah muncul kecenderungan mereka untuk berjalan sendiri, lepas atau independen dari pengurus nasional yang tampak dari adanya perbedaan sikap antarpengurus daerah dan nasional tentang berbagai persoalan, bisa jadi aliansi daerah akan terkonsolidasi menjadi gerakan buruh yang kuat di masa yang akan datang.

Memang pembangunan aliansi yang kuat masih menyisakan persoalan yang cukup sensitif berupa belum adanya *flatform* bersama. Selain itu, persoalan eksistensial masing-masing serikat juga masih cukup kuat. Secara umum semua serikat buruh saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan internal yang cukup berat, basis organisasi yang terus berkurang akibat PHK yang masih berlanjut, terutama di sektor tekstil dan garmen. Sebagian besar buruh kembali ke kampungnya, sebagian lainnya mencari kerja di sektor informal. Dan ini menimbulkan persoalan berikutnya: langkanya dukungan iuran anggota. Sebagian besar sumber keuangan serikat masih berasal dari luar organisasi ketimbang dari koleksi iuran anggota. Ketika dukungan dana dari luar berhenti, sebagian kegiatan mereka juga terhenti. Beberapa masalah di atas telah ikut andil dalam persoalan keterpecah-pecahan organisasi-organisasi buruh dewasa ini.

CATATAN UNTUK GERAKAN BURUH

Menyamakan perhatian buruh dan menyatukan pandangan para aktifis perburuhan tentang apa yang terbaik bagi buruh memang hampir mustahil terjadi. Namun demikian, hal itu harus tetap diupayakan, dalam arti bahwa *platform* bersama adalah prasyarat mutlak bagi terbentuknya gerakan buruh yang kuat. Ketekunan dan kesabaran yang penuh tentu sangat dibutuhkan, selain

visi dan keterarahan tujuan untuk memperbaiki nasib buruh dan masyarakat secara luas.

Sebagian dari kita barangkali masih belum juga yakin apakah gerakan buruh akan muncul, atau setidak-tidaknya perbaikan kondisi perburuhan sekarang ini akan sungguh-sungguh terjadi. Hal itu wajar karena di tahun-tahun mendatang prospek suram masih menyelimuti Indonesia. Tahun 2004 kembali menjadi masa sulit bagi kondisi ekonomi negeri ini. Untuk mengatasi jumlah pengangguran yang semakin meresahkan, pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan adalah minimal 7 persen. Namun daya pembangunan hanya mampu tak lebih dari 4-5 persen. Sementara itu pemilu 2004 seakan menjadi batu sandungan dan ujian berikutnya: akankah Indonesia mampu mengatasi keterpurukan ekonominya sambil membangun citra politik yang carut marut? Tidak sedikit kalangan yang sangsi pada kondisi ekonomi di tahun politik ini.

Klaim pemerintah tentang keberhasilan melaksanakan Inpres No. 5/2003, dikenal juga sebagai *White Paper*, dinilai belum tepat karena pemerintah telah gagal memperbaiki iklim investasi dan belum mampu mengatasi pengangguran yang mencapai 40 juta, di mana 10 juta jiwa di antaranya berstatus pengangguran terbuka, yakni penduduk yang sama sekali tidak bekerja.

Angka pengangguran pada 2004 jelas akan meningkat tajam. Industri kehutanan dan TPT diprediksi akan memberhentikan 750 ribu buruh. PHK di sektor kehutanan tidak bisa dihindari karena pemilik perusahaan memilih menutup perusahaan akibat kesulitan bahan baku kayu. Di sektor TPT, membanjirnya produk TPT impor di pasar lokal disamping rencana penghapusan kuota mengancam perusahaan-perusahaan TPT gulung tikar. Banyak perusahaan-perusahaan garmen akhir-akhir ini hengkang dari Kawasan Berikat Nusantara karena mereka datang dengan target mendapatkan kuota yang tersedia tanpa memiliki rencana dan pengembangan usaha. Jual beli kuota yang terjadi itu pun berdampak sangat buruk pada buruh, termasuk berkurangnya jumlah anggota serikat secara tajam akibat terjadinya PHK massal di sektor ini.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSPTSK), mengklaim bahwa jumlah anggotanya yang sebelumnya 540.000, sejak 1999 mengalami penurunan hingga 40.000 buruh. Melihat kecenderungan industri tekstil yang meredup ini, FSPTSK pun mengubah diri menjadi Serikat Pekerja Nasional (SPN). Perubahan itu salah satunya karena sektor tekstil, sandang dan kulit (termasuk sepatu) tak banyak lagi diharapkan di masa depan. Sebagai industri terbenam, tekstil dan garmen tidak lagi memiliki prospek yang cerah. Perubahan FSPTSK menjadi SPN pun dimaksudkan untuk merekrut anggota dari sektor lain.

Ada beberapa catatan dalam menyikapi kecenderungan perburuhan di tahun-tahun mendatang. **Pertama**, penguatan dan perluasan basis. Maraknya kasus PHK dan semakin melemahnya basis serikat memang cukup memberatkan kerja-kerja serikat buruh. Namun, fakta ini harus dilawan oleh serikat dengan tetap melakukan penguatan dan perluasan basis sebisa mungkin. Jika tidak, penjinakan yang terjadi di serikat akan kian parah. Peran serikat juga hendaknya diperluas hingga pada urusan di tempat domisili di mana buruh tinggal. Advokasi yang dilakukan serikat bagi anggotanya tidak sebatas mengenai hubungan kerja, karena buruh pun memiliki persoalan sampai di lingkungan tempat tinggalnya (komunitas) dan berhubungan dengan masyarakatnya (sosial). Dalam artian ini, serikat mengemban kerja sebagai gerakan sosial. Peran dan orientasi serikat bukanlah sebagai organisasi runding, melainkan sebagai gerakan sosial. Namun demikian, upaya ini mengandaikan bahwa telah dilakukan pembenahan persoalan-persoalan internal serikat agar benturan kepentingan serikat di tingkat komunitas ini dapat terhindarkan.

Untuk itu, **kedua**, serikat dituntut memiliki orientasi sosial dan politik, melakukan perluasan konstituen, melakukan perubahan internal yang dinamis baik secara kualitas maupun kuantitas, dan terorganisisasi secara demokratis. **Ketiga**, terus dilakukannya upaya beraliansi antarserikat dan membangun *platform* bersama. Hal ini penting untuk mengikis kenyataan bahwa serikat-serikat saat ini cenderung terpecah-pecah dan sulit bekerja sama. Kerja sama serikat juga hendaknya dilakukan bersama-sama dan melibatkan organisasi-organisasi sosial lainnya, karena gerakan buruh yang kuat membutuhkan dukungan penuh dari organisasi-organisasi sosial lain secara luas.

Keempat, serikat perlu melakukan kampanye tentang kenyataan dan kondisi yang dihadapi buruh. Ini perlu dilakukan agar buruh di tingkat bawah menyadari kondisi yang kelak dihadapinya, selain agar kesadaran mereka tumbuh dan upaya sosialisasi dan pendidikan di tingkat basis juga terjadi. **Kelima**, perlunya pendidikan politik terhadap buruh. Buruh hendaknya terus dididik agar partisipasi politis mereka dalam serikat jauh lebih optimal lagi. Kerja-kerja di serikat harus tetap dijalankan, tanpa tergoda untuk terlibat dalam kesibukan suatu partai politik, misalnya, karena logika kerja partai sangat berbeda dengan serikat. ***